

UNIT PELAKSANA TEKNIS HUMAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

KLIPING

Klasifikasi : Universitas Diponegoro

Tema : Otonomi Perguruan Tinggi

Surat Kabar / Majalah : Suara Merdeka

Hari **Kamis** , Tanggal **10**, Bulan **Juni** , Tahun **2010**, Halaman **17** Kolom --

Ringkasan :

Catatan :

Otonomi Perguruan Tinggi

Oleh Sudharto P Hadi



TIDAK ada isu yang paling hangat tentang pendidikan tinggi kecuali pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pokok pembatalan yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa penyeragaman bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan tidak senapas dengan jiwa UUD 1945.

Organisasi BHMN dijalankan oleh manajemen yang profesional dan berjiwa wirausaha kuat, karena BHMN hakikatnya menjalankan usaha dalam bidang pendidikan meskipun diperhalus dengan kegiatan usaha nir laba.

Otonomi dalam status badan hukum tinggi masih dimaknai dalam wilayah dana. Yang paling mencolok dilakukan adalah dari sektor penerimaan mahasiswa. Jika dulu hanya ada satu atau dua pola penerimaan mahasiswa, sekarang setiap PT memiliki berbagai jalur dengan besaran sumbangan sangat beragam.

Semula memang UGM yang memelopori jalur penerimaan mahasiswa melalui ujian mandiri (UM) dengan alasan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki kompetensi wawasan kebangsaan. Di balik alasan itu perguruan tinggi terbesar dan tertua itu memberlakukan besaran sumbangan sebagai salah satu komponen persyaratan. Di ITB secara kelakar dikenal istilah

nyumbang, iuan bahwa syarat akademik tetap yang diutamakan. Kebijakan ini tentu saja menutup akses bagi mereka yang tidak mampu. Padahal prinsip *education for all* tidak mengenal diskriminasi. Siapa yang memiliki kecerdasan akademik selayaknya mendapatkan tempat untuk menempuh pendidikan.

Selain memungut sumbangan dari calon mahasiswa, banyak perguruan tinggi memiliki usaha yang tidak terkait dengan bidang akademik. IPB memiliki mal, USU memiliki kebun kelapa sawit, UGM juga pernah akan merintis berdirinya mal tetapi tersandung perkara dengan pihak pengembang. Upaya demikian sebenarnya wajar dilakukan sepanjang pengelolaanya transparan dan akuntabel, dan hasilnya didayagunakan untuk pengembangan mutu akademik.

Beberapa perguruan tinggi di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Kampus modern di negeri barat banyak yang sebagian arealnya digunakan untuk pertokoan, meskipun sebagian besar produk yang dijual untuk memenuhi kebutuhan komunitas kampus seperti toko buku, suvenir, kafetaria. Chulalongkorn University, perguruan tinggi tertua dan terbesar di Thailand konon memiliki saham terbesar di pusat perbelanjaan Siam Square di Bangkok.

Perguruan tinggi memiliki mandat melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upayanya mewujudkan visi. Dari tiga pilar itulah diwujudkan strategi dan program yang sesungguhnya merupakan instrumen otonomi perguruan tinggi.

Ujung tombak tiga pilar PT adalah jurusan, program studi, laboratorium, pusat penelitian, pusat kajian yang juga menjadi roh kehidupan PT.

Kebijakan yang demikian bukan saja memberdayakan *resources* di tingkat unit melainkan juga menghasilkan pendapatan untuk pengembangan peralatan dan laboratorium, serta meningkatkan mutu pembelajaran. Langkah ini akan menumbuhkan budaya akademik yang diperlukan dalam meningkatkan mutu akademik. (10)

— Sudharto P Hadi, dosen FISIP Universitas Diponegoro